

# ISU Sepekan

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

*Minggu ke 3 Bulan November 2021 (tanggal 12 s.d 18 November)*



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

## MEMBERANTAS MAFIA TANAH

Anin Dhita Kiky Amrynudin  
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri  
anin.amrynudin@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Memberantas mafia tanah bukan hal yang mudah, hal ini dikarenakan kuatnya jaringan dan kemampuan keuangan para pelaku. Setidaknya sudah 125 pegawai BPN yang terlibat kasus mafia tanah dan dihukum per Oktober 2021. Pergerakan mafia tanah belakangan semakin agresif, tidak hanya menasar pihak swasta, tapi negara juga. Oknum mafia tanah berasal dari oknum pengadilan, oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum di pemerintah daerah, dll. Banyak dari mereka berhasil mengambil aset negara, aset pemda dan aset BUMN. Ditegaskan oleh Menteri ATR/BPN para oknum telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana. Guna mengantisipasi hal itu, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pendekatan sistematis melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan mempercepat proses pendaftaran sertifikat tanah karena sebagian besar tanah masyarakat tidak bersertifikat lantaran lambannya proses pembuatan sertifikat.

Beberapa kasus Mafia tanah terjadi antara lain di Sulawesi Selatan (25 Oktober 2021) yakni sejumlah aset negara milik Pemprov Sulawesi Selatan seperti PT.Pelindo, PT. PLN dan Universitas Hasanuddin digugat oleh mafia tanah. Selanjutnya, di Kalimantan Timur (Maret 2021) PT. Konsultan Pertanahan Nusantara mengaku ditunjuk oleh Bappenas menjadi mitra pemerintah pusat sebagai penyedia pengadaan lahan untuk ibukota negara di Penajam Paser dan Kutai Kartanegara dan masih banyak kasus lainnya, hingga kasus terbaru pada 13 November 2021 tanah seluas 32 hektar di Kelapa Gading Barat milik TNI AL diklaim oleh sejumlah pihak.

### SUMBER

Media Indonesia, 17 November 2021; bisnis.com, 18 November 2021.